

**PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN PENGANGGARAN TERHADAP SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE (GGG) DI BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN BANDUNG**

**Oleh : Indra Firmansyah, Ulya Fitriana
indrafirmansyah@poltekpos.ac.id**

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan dan penganggaran terhadap SPIP dan implikasinya terhadap GGG pada BAPPEDA kab. Bandung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer kuesioner. Populasi dan sampel pada penelitian ini adalah 55 orang pegawai BAPPEDA kab. Bandung oleh karena itu hal ini merupakan sampling jenuh. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *path analysis* dengan menggunakan spss 24.0. Hasilnya menunjukkan bahwa Kepemimpinan dan Penganggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap SPIP baik secara parsial maupun simultan. Serta Kepemimpinan, Penganggaran dan SPIP berpengaruh positif dan signifikan terhadap GGG pada saat uji secara parsial ataupun simultan. Berdasarkan koefisien hasil analisis jalur didapat bahwa koefisien Kepemimpinan dan Penganggaran secara langsung terhadap GGG lebih kecil dibandingkan dengan koefisien hasil analisis jalur Kepemimpinan dan Penganggaran melalui perantara SPIP terhadap GGG. Hal ini menunjukkan bahwa SPIP dapat dijadikan variabel perantara antara variabel eksogen dan endogen dalam penelitian ini. Jadi, apabila Kepemimpinan dan Penganggarannya baik maka SPIP nya juga baik dan apabila SPIP baik maka implikasinya terciptalah GGG.

Kata Kunci : Kepemimpinan, Penganggaran, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan *Good Government Governance*

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Good governance (tata pemerintahan yang baik) sudah lama menjadi mimpi buruk banyak orang di Indonesia. Kendati pemahaman mereka tentang *good governance* berbeda-beda, namun setidaknya sebagian besar dari mereka membayangkan bahwa dengan *good governance* mereka akan mendapat kualitas pemerintahan yang lebih baik. Banyak diantara mereka membayangkan bahwa dengan memiliki praktik *good governance* yang lebih baik, maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga (dwiyanto:2005) yang dikutip oleh (Goto:2012). Menurut Witman (2014) "...jawaban yang didapat adalah realitanya saat ini pemerintah dan lembaga pemerintah lainnya belum melaksanakan sepenuhnya tata pemerintahan yang baik. Masyarakat sebagian besar masih merasakan bahwa mereka belum memperoleh pelayanan publik yang lebih baik dari pemerintah...". Hal ini semakin diperkuat dengan adanya berbagai kasus yang terjadi. Seperti, masih maraknya kasus Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), masih kurangnya integritas serta transparansi yang masih belum diterapkan sepenuhnya oleh sektor publik. Dikutip dari intisari-online.com dari kasus-kasus korupsi yang terjadi selama semester I-2014, sebagian besar tersangka adalah pejabat/pegawai pemerintah daerah (pemda) dan kementerian, yakni 42,6%. Tersangka lain merupakan direktur/komisaris perusahaan swasta, anggota DPR/DPRD, kepala dinas, dan kepala daerah padahal seharusnya sektor publik menjadi sektor yang dapat menjadi kepercayaan bagi masyarakat luas. Kasus-kasus tersebut merupakan sebagian kecil dari permasalahan yang menjadi alasan bahwa untuk membuat suatu pemerintahan yang baik masih belum bisa dicapai dengan mudah, karena masih banyak hal yang harus dibenahi dan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Terciptanya *Good Government Governance* pada dasarnya merupakan kewajiban bagi pemerintah sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan aspirasi yang diinginkan oleh masyarakat. *Good Government* sendiri sebenarnya telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yakni UU nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

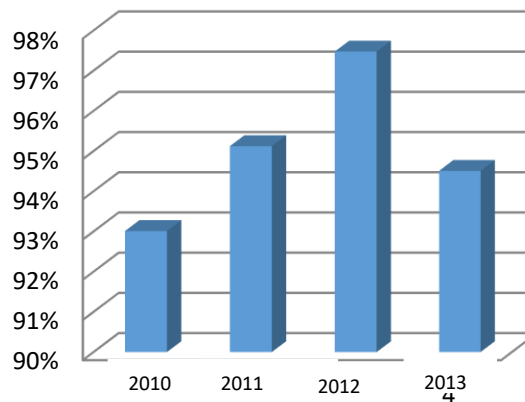
Dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 sistem pengendalian intern pemerintah ini telah disebutkan, didalamnya dijelaskan bahwa pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pemimpin dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atau tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamatan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern pemerintah sangat dibutuhkan agar tidak terjadi kecurangan (*fraud*), karena kecurangan ini rentan sekali dalam organisasi. Menurut Siko Wiyanto dalam "Kritik atas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah" Kompasiana tahun 2013 yang diperbarui 2015 menyebutkan bahwa pengendalian intern merupakan salah satu kunci organisasi dalam mencapai tujuannya. Kasus terjadinya kecurangan pada Enron Corp merupakan hasil lemahnya sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern merupakan kunci bagaimana organisasi menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Demikian pula pemerintahan, sistem pengendalian ini sangat penting karena tujuan Negara ini dicapai dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya meningkatkan fungsi sistem pengendalian intern pemerintah dalam berbagai aspek memang harus dilakukan, dan peran pemimpin dalam menjalankan kepemimpinan yang baik serta didukung dengan perencanaan

keuangan atau penganggaran yang tepat agar setiap anggota dapat melaksanakan pekerjaan yang diamanahkannya secara sungguh-sungguh.

Penganggaran merupakan komponen penting dalam sebuah organisasi baik itu organisasi sektor publik maupun sektor swasta. Penganggaran dapat memberikan standar yang dapat mengendalikan penggunaan berbagai sumber daya organisasi. Penganggaran juga dapat membantu komunikasi dan koordinasi. Penganggaran secara formal mengkomunikasikan rencana organisasi pada tiap pegawai. Penganggaran merupakan elemen penting dalam siklus Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD). Oleh karena itu, untuk memahami seluk beluk aktivitas perencanaan dan penganggaran tersebut tentunya tidak terlepas dari pembahasan mengenai kerangka hukum yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat kita pahami mengingat manajemen keuangan di sektor pemerintah lebih mengedepankan pada aspek ketaatan terhadap peraturan dengan tujuan akhir yaitu untuk memaksimalkan kemakmuran rakyat (*stakeholders*).

Salah satu organisasi sektor publik yang diberi wewenang untuk menciptakan *good government governance* adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) dikarenakan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) kabupaten Bandung yang dipilih peneliti sebagai lokasi penelitian belum melaksanakan kepemimpinan, penganggaran, SPIP dan *good government governance* secara optimal berdasarkan prosentase realisasi anggaran seperti gambar berikut ini :



Gambar 1.1
Prosentase Realisasi Anggaran

Pada gambar 1.1 dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran tidak dapat di serap 100%. Dari tahun 2010-2012 prosentasenya selalu naik, namun menurun pada tahun 2013. Berdasarkan survey tersebut disimpulkan bahwa adanya pengendalian intern pemerintah yang kurang dari pemimpin sehingga penyerapan anggaran realisasinya tidak dapat mencapai 100% dari anggaran yang telah direncanakan.

Dalam penelitian sebelumnya oleh Yusniyar, Darwanis, Syukriy Abdullah (2016) dengan judul Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Intern terhadap *Good governance* dan dampaknya pada Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada SKPA Pemerintah Aceh) diperoleh Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sistem akuntansi

pemerintahan dan pengendalian intern baik secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap *good governance*. berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam penelitian tersebut terdapat variabel sistem pengendalian intern pemerintah terhadap *good governance*, sedangkan penelitian ini menambahkan variabel kepemimpinan dan penganggaran.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kepemimpinan dan Penganggaran terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Implikasinya terhadap Good Government Governance (GGG) di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bandung”

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap sistem pengendalian intern pemerintah secara parsial di Bappedda kabupaten Bandung.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh penganggaran terhadap sistem pengendalian intern pemerintah secara parsialdi Bappedda kabupaten Bandung.
- 3) Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan dan penganggaran terhadap sistem pengendalian intern pemerintah secara simultan di Bappedda kabupaten Bandung.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap *good government governance* secara parsialdi Bappedda kabupaten Bandung.
- 5) Untuk mengetahui pengaruh penganggaran terhadap *good government governance* secara parsialdi Bappedda kabupaten Bandung.
- 6) Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap *good government governance* secara parsialdi Bappedda kabupaten Bandung.
- 7) Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan, penganggaran dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap *good government governance* secara simultandi Bappedda kabupaten Bandung.

METODE PENELITIAN

1. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai bappedda kabupaten bandung berjumlah 55 orang dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh, sehingga dari 55 pegawai tersebut semuanya dijadikan sebagai sampel. Jadi total kuesioner yang disebar ada 55 kuesioner untuk 55 orang.

2. Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2012:38) mendefinisikan operasional variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Berikut ini adalah operasional variabel :

Tabel 1.1
Operasionalisasi Variabel Penelitian

| No | Variabel | Indikator | Sub. Indikator | Ukuran | Skala | Alat Uji |
|----|--------------------------------|--------------------------|--|---|---------|--|
| 1. | Kepemimpinan (X ₁) | 1. Pengambilan Keputusan | a. Kemampuan dalam mengambil keputusan. | a. Tingkat Kemampuan dalam mengambil keputusan. | Ordinal | Uji Normalitas, Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Koefisien Determinasi, Konversi Data, Uji t dan Uji F |
| | | | b. Pemimpin mengkomunikasikan keputusan yang telah ditetapkan. | b. Tingkat pemfasilitasan aktifitas pegawai. | | |
| | | | c. Pemimpin menyampaikan keputusan kepada anggotanya.. | c. Kualitas pemimpin menyampaikan keputusan kepada anggotanya | | |
| | | 2. Fungsi Instruktif | a. Koordinasi dalam memberikan perintah. | a. Tingkat koordinasi dalam memberikan perintah | Ordinal | |
| | | | b. Koordinasi dalam pembuatan jadwal-jadwal kegiatan yang dilakukan oleh anggota. | b. Tingkat koordinasi dalam pembuatan jadwal-jadwal kegiatan yang dilakukan oleh anggota | | |
| | | | c. Koordinasi dalam pelaksanaan dari agenda kerja.. | c. Tingkat koordinasi dalam pelaksanaan dari agenda kerja. | | |
| | | 3. Fungsi Konsultatif | a. Kesediaan pemimpin sebagai figur konsultatif terkait masalah-masalah pekerjaan. | a. Tingkat kesediaan pemimpin sebagai figur konsultatif terkait masalah-masalah pekerjaan.. | Ordinal | |
| | | | b. Memberikan kesempatan kepada para anggota untuk menyampaikan keluhan. | b. Tingkat memberikan kesempatan kepada para anggota untuk menyampaikan keluhan. | | |
| | | 4. Fungsi Partisipatif | a. Keterlibatan pemimpin proses pengembangan anggota organisasi. | a. Tingkat keterlibatan pemimpin proses pengembangan anggota organisasi. | Ordinal | |
| | | | b. Kemampuan pemimpin dalam melakukan pembinaan kepada anggota. | b. Tingkat kemampuan pemimpin dalam melakukan pembinaan kepada anggota. | | |
| | | | c. Kemampuan pemimpin dalam melakukan kerja sama dengan anggota. | c. Tingkat kemampuan pemimpin dalam melakukan kerja sama dengan anggota.. | | |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------|-------------------------|--|---|---------|--|
| | | 5. Fungsi Delegatif | <ul style="list-style-type: none"> a. Kemampuan pemimpin dalam mendayagunakan sumber daya.. b. Kemampuan pemimpin dalam membagi tugas dan tanggungjawab anggota sesuai dengan kompetensinya. | <ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat Kemampuan pemimpin dalam mendayagunakan sumber daya b. Tingkat Kemampuan pemimpin dalam membagi tugas dan tanggungjawab anggota sesuai dengan kompetensinya. | Ordinal | |
| 2. | Penganggaran (X ₂) | 1. Partisipasi Anggaran | <ul style="list-style-type: none"> a. Keterlibatan dalam melaksanakan kerjasama dengan pihak lain. b. Pemerintah mengawasi penyaluran dana c. Kesediaan pemerintah dalam konsultasi masalah anggaran pemerintah baik pengalokasian maupun penggunaan anggaran | <ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat keterlibatan pemerintah dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain b. Tingkat pengawasan pemerintah dalam penyaluran dana c. Frekuensi pemerintah dalam kesediaan konsultasi masalah anggaran baik pengalokasian maupun penggunaan anggaran | Ordinal | Uji Normalitas, Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Koefisien Determinasi, Konversi Data, Uji t dan Uji F |
| | | 2. Sasaran Anggaran | <ul style="list-style-type: none"> a. Kesulitan dalam mencapai anggaran. b. Komitmen tujuan anggaran dengan organisasi. c. Kesesuaian antara tujuan dengan ketersediaan anggaran. | <ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat ketidaktepatan dalam pencapaian anggaran b. Tingkat komitmen tujuan anggaran dengan organisasi c. kesesuaian antara tujuan dengan ketersediaan | Ordinal | |
| | | 3. Kecukupan Anggaran | <ul style="list-style-type: none"> a. Kemudahan dalam memperoleh anggaran dari pemerintah b. Kecukupan anggaran yang disediakan c. Kesesuaian antara pengajuan dengan realitas anggaran | <ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat kemudahan dalam memperoleh anggaran dari pemerintah b. Tingkat kecukupan anggaran yang tersedia c. Tingkat kesesuaian antara pengajuan dengan realitas anggaran | Ordinal | |

| | | | | | | |
|----|---|----------------------------|--|--|---------|--|
| | | 4. Revisi Anggaran | <ul style="list-style-type: none"> a. Prosedur dalam perubahan anggaran b. Kesempatan pemerintah dalam mendiskusikan perubahan anggaran c. Kesiadaan pihak pemerintah dalam merevisi anggaran | <ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat kesesuaian prosedur dalam perubahan anggaran b. Frekuensi pemberiar kesempatan oleh pemerintah dalam mendiskusikan perubahan anggaran c. Tingkat kesiadaan pemerintah dalam merevisi anggaran | Ordinal | Uji Normalitas, Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Koefisien Determinasi, Konversi Data, Uji t dan Uji F |
| | | 5. Evaluasi Anggaran | <ul style="list-style-type: none"> a. Pencapaian program dengan target b. Keterlibatan pemerintah dalam melakukan evaluasi anggaran c. Evaluasi anggaran selalu dijadikan pedoman | <ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat ketepatan pencapaian program kerja dengan target b. Tingat keterlibatan pemerintah dalam melakukan evaluasi anggaran c. Frekuensi evaluasi anggaran untuk dijadikan sebagai pedoman, | Ordinal | |
| 3. | <p>Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Y)</p> <p>Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Y)</p> | 1. Lingkungan Pengendalian | <ul style="list-style-type: none"> a. Penegakan integritas dan nilai etika b. Komitmen terhadap kompetensi c. Kepemimpinan yang kondusif d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia g. Perwujudan peran aparat pengawas | <ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat penegakkan integritas dan nilai etika b. Tingkat komitmen terhadap kompetensi c. Tingkat Kepemimpinan yang kondusif d. Tingkat Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan e. Tingkat Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat f. Tingkat Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia | Ordinal | |

| | | | | | | |
|--|--|--------------------------|---|---|---------|--|
| | | | intern pemerintah yang efektif | g. Tingkat Perwujudan peran aparat pengawas intern pemerintah yang efektif | | |
| | | | h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi pemerintah terkait | h. Tingkat hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait | | |
| | | 2. Penilaian Risiko | a. Identifikasi risiko | a. Tingkat identifikasi risiko | Ordinal | Uji Normalitas, Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Koefisien Determinasi, Konversi Data, Uji t dan Uji F |
| | | | b. Analisis risiko | b. Tingkat analisis risiko | | |
| | | 3. Kegiatan Pengendalian | a. Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan | a. Tingkat review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan | | |
| | | | b. Pembinaan sumber daya manusia | b. Tingkat pembinaan sumber daya manusia | | |
| | | | c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi | c. Tingkat pengendalian atas pengelolaan sistem informasi | | |
| | | | d. Pengendalian fisik atas aset | d. Tingkat pengendalian fisik atas aset | | |
| | | | e. Penetapan review atas indikator dan ukuran kinerja | e. Tingkat penerapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja | | |
| | | | f. Pemisahan fungsi | f. Tingkat pemisahan fungsi | | |
| | | | g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting | g. Tingkat otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting | | |
| | | | h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian | h. Tingkat pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian | | |
| | | | i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya | i. Tingkat pembatasan akses | | |

| | | | | | | |
|----|---------------------------------------|---|---|--|---|--|
| | | 4. Informasi dan Komunikasi | | atas sumber daya dan pencatatannya | | |
| | | 5. Pemantauan dan Pengendalian Intern | a. Informasi | a. Tingkat keefektifan informasi | | |
| | | | b. Komunikasi | b. Tingkat kemampuan, kelancaran dan intensitas | | |
| | | 5. Pemantauan dan Pengendalian Intern | a. Pemantauan Berkelanjutan | a. Tingkat pemantauan yang berkelanjutan | | |
| | | | b. Evaluasi Terpisah | b. Tingkat penetapan evaluasi terpisah | | |
| | | | c. Tindak Lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya | c. Tingkat tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya | | |
| 4. | <i>Good Government Governance (Z)</i> | 1. Partisipasi | a. Nilai dan komitmen. b. Forum untuk menampung partisipasi pegawai. c. Kemampuan pegawai untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan | a. Tingkat <i>public hearing</i> . b. Tingkat pertemuan kelompok karyawan. c. Tingkat jejak pendapat umum. | Ordinal | Uji Normalitas, Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Koefisien Determinasi, Konversi Data, Uji t dan Uji F |
| | | 2. Supremasi hukum (<i>rule of law</i>) | a. Sanksi pelanggaran hukum. b. Respon pegawai/karyawan terhadap rule of law c. Penegakan hukum kepada pegawai | a. Tingkat sanksi hukum. b. Tingkat respon karyawan c. Tingkat penegakan hukum. | Ordinal | |
| | | | 3. Transparan | a. Penyedia informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab. b. Kemudahan akses informasi. c. Menyusun suatu pengaduan jika ada peraturan yang di langgar | a. Tingkat publikasi kebijakan publik melalui alat-alat komunikasi. b. Tingkat informasi yang disajikan sebagai acuan pelayanan dan perawatan data. c. Tingkat penanganan keluhan | |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---|---------|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> a. Lembaga publik harus cepat dalam melayani <i>stakeholder</i>. b. Lembaga publik harus tanggap dalam melayani <i>stakeholder</i>. c. Lembaga publik/ pegawai mampu memberikan alternatif pemecahan masalah. | <ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat kecepatan lembaga publik dalam melayani <i>stakeholder</i> b. Tingkat ketanggapan lembaga publik dalam melayani <i>stakeholder</i>. c. Tingkat kemampuan memberikan alternatif pemecahan masalah | Ordinal | |
| | | 4. Memberikan respon (<i>responsiveness</i>) | <ul style="list-style-type: none"> a. Menciptakan forum dialog dengan masyarakat yang dinamis dan efisien. b. Sosialisasi program yang telah disusun kepada unsur masyarakat dan pelaku usaha. c. Manajemen modern terbangun dari komunikasi | <ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat kedinamisan dan keefisienan forum dialog dengan masyarakat. b. Frekuensi sosialisasi program yang telah disusun. c. Tingkat komunikasi dengan masyarakat dan pelaku usaha | Ordinal | |
| | | 5. Orientasi kesepakatan/ pemufakatan bersama (<i>consensus orientation</i>) | <ul style="list-style-type: none"> a. Perlakuan yang sama antara anggota masyarakat dan pelaku usaha. b. Program yang mengacu pada aturan. c. Penciptaan iklim kondusif | <ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat perlakuan yang sama antara anggota masyarakat dan pelaku usaha b. Tingkat program yang mengacu pada aturan. c. Tingkat penciptaan iklim kondusif | Ordinal | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> a. Aktivitas yang dilakukan berdaya guna dan berhasil guna b. Ketersediaan sumber daya manusia sesuai bidang keahlian masing-masing. c. Ketepatan sasaran dan dampak yang ditimbulkan. | <ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat aktivitas yang dilakukan berdaya guna dan berhasil guna. b. Tingkat ketersediaan sumber daya manusia sesuai bidang dan keahlian masing-masing. c. Tingkat ketepatan sasaran dan dampak yang ditimbulkan. | Ordinal | |

| | | | | | | | |
|--|------------------|------------------------------|---|--|---------|--|--|
| | | 6. Keadilan/ Keadilan | <ul style="list-style-type: none"> a. Laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan setiap kegiatan. b. Mengungkapkan segala aktivitas yang dilakukan. c. Penyusunan standar pertanggungjawaban sesuai keinginan dan harapan publik. | <ul style="list-style-type: none"> a. Frekuensi pembuatan laporan atas pelaksanaan setiap kegiatan. b. Tingkat pengungkapan segala aktivitas yang dilakukan. c. Tingkat penyusunan standar pertanggungjawaban sesuai dengan keinginan dan harapan publik, | Ordinal | | |
| | | 7. Efisiensi dan efektivitas | <ul style="list-style-type: none"> a. Visi disusun sesuai dengan kebutuhan di masa akan datang. b. Keterkaitan pelaksanaan aktivitas dengan perencanaan. c. Pengawasan kinerja secara sinergis. | <ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat visi disusun sesuai dengan kebutuhan di masa akan datang. b. Tingkat keterkaitan pelaksanaan aktivitas dengan perencanaan. c. Tingkat pengawasan kinerja secara sinergis. | Ordinal | | |
| | 8. Akuntabilitas | | | | | | |
| | 9. Visi strategi | | | | | | |

Sumber : Data Diolah

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data, data yang digunakan adalah data primer, data yang terkumpul dalam penelitian ini menggunakan *path analysis*, uji validitas yaitu menguji keakuratan data yang digunakan dalam penelitian. Penilaian data menggunakan teknik *corrected item-total correlation*, yaitu dengan cara mengkorelasi skor tiap item dengan skor totalnya. Uji reliabilitas untuk mengetahui kuesioner yang diberikan kepada responden andal atau tidak. Uji normalitas untuk mengetahui berdistribusi normal atau tidak. Analisis data dihitung dengan menggunakan program SPSS versi 24.

Pengujian *Path Analysis* dilakukan agar dapat diketahui bahwa variabel Y sebagai variabel intervening adalah sesuai atau tidak, hal ini dapat dilihat dari hasil koefisien secara langsung dan tidak langsung yang dibandingkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Validitas dan Realiabilitas

Untuk menguji validitas kuesioner digunakan rumus korelasi product moment. Analisis validitas kuesioner meliputi variabel Kepemimpinan (X_1), Penganggaran (X_2), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Y) dan Good Government Governance (Z). Butir pernyataan dinyatakan valid apabila $r_{hitung} > 0,3$ Sugiyono (2012:178). Hasil pengujian validitas kuesioner untuk semua variabel penelitian lebih besar dari kriteria minimum sebesar 0,3. Dengan demikian, maka seluruh item pernyataan untuk semua variabel tersebut dinyatakan valid.

Pengujian reliabilitas kuesioner atau pernyataan dalam penelitian ini digunakan rumus *cronbach alpha*. Analisis reliabilitas koesioner meliputi Kepemimpinan (X_1), Penganggaran (X_2), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Y) dan Good Government Governance (Z). setiap variabel dinyatakan reliable menurut Sugiyono (2012) apabila memiliki nilai *cronbach alpha* sama dengan 0,6 atau $> 0,6$.

Hasil pengujian reliabilitas kuesioner untuk semua variabel lebih besar dari kriteria minimum sebesar 0,6. Dengan demikian maka, semua variabel tersebut dinyatakan reliable. Pengujian normalitas kuesioner atau pernyataan dalam penelitian ini digunakan *kolgomov smirnov*. Analisis normalitas koesioner meliputi Kepemimpinan (X_1), Penganggaran (X_2), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Y) dan Good Government Governance (Z). setiap variabel dinyatakan berdistribusi normal dengan menunjukkan nilai *p-value* > 0.05 . Hasil pengujian rnormalitas kuesioner untuk semua variabel memiliki nilai *p-value* > 0.05 . Dengan demikian maka, semua variabel tersebut dinyatakan normal.

Dari hasil perhitungan SPSS dengan menggunakan Path Analisy dihasilkan data sebagai berikut :

Tabel 1.2
Pengaruh Langsung dan Pengaruh Tidak Langsung

| Variabel | Koefisien Jalur | Kontribusi | | Total | Kontribusi Bersama |
|--------------|-----------------|------------|------------------------------|-------|--------------------|
| | | Langsung | Tidak langsung (melalui Y) | | |
| X1 | 0,091 | 0,091 | $0,352 \times 0,868 = 0,306$ | 0,397 | |
| X2 | 0,129 | 0,129 | $0,342 \times 0,868 = 0,297$ | 0,426 | |
| Y | 0,868 | 0,868 | | | |
| e1 | 0,68 | 68% | | | |
| e2 | 0,087 | 8,70% | | | |
| X1 dan X2 | | | | | 0,32 |
| X1, X2 dan Y | | | | | 0,913 |

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa variabel Kepemimpinan (X_1) mempunyai pengaruh langsung terhadap *good government governance* (Z) sebesar 9,10% dan pengaruh tidak langsung yang melalui variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Y) adalah sebesar 30,60%, sehingga total pengaruh Kepemimpinan (X_1) terhadap *good government governance* (Z) sebesar 39,70%.

Variabel Penganggaran (X_2) mempunyai pengaruh langsung terhadap *good government governance* (Z) sebesar 12,90% dan pengaruh tidak langsung yang melalui variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Y) adalah sebesar 29,70%, sehingga total pengaruh Penganggaran (X_2) terhadap *good government governance* (Z) sebesar 42,60%.

Berdasarkan hasil perhitungan dari tabel diatas diketahui bahwa nilai variabel Kepemimpinan terhadap *Good Government Governance* mempunyai pengaruh langsung sebesar 9,10% dan pengaruh tidak langsungnya 30,60 % yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung, hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X1 melalui Y mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z yang artinya bahwa Sistem pengendalian intern pemerintah berhasil dikatakan sebagai variabel intervening

(perantara) antara variabel eksogen yaitu kepemimpinan dengan variabel endogen *Good Government Governance*.

Begitu pula dengan variabel penganggaran mempunyai pengaruh langsung terhadap *Good Government Governance* sebesar 12,90% dan pengaruh tidak langsungnya 29,70% yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung, hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X2 melalui Y mempunyai pengaruh signifikan terhadap Z yang artinya bahwa Sistem pengendalian intern pemerintah berhasil dikatakan sebagai variabel intervening (perantara) antara variabel eksogen yaitu penganggaran dengan variabel endogen *Good Government Governance*.

2. Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara Parsial pada BAPPEDA di Kabupaten Bandung

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat disimpulkan bahwa variabel kepemimpinan (X_1) mempunyai pengaruh langsung terhadap sistem pengendalian intern pemerintah (Y) sebesar 35,2% dengan pengujian t signifikan karena $0.005 < 0,05$. Kepemimpinan dan sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh yang sangat penting. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan organisasi (Mulyasa, 2013:107).

3. Pengaruh Penganggaran Terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara Parsial pada BAPPEDA Kabupaten Bandung

Variabel penganggaran (X_2) mempunyai pengaruh langsung terhadap sistem pengendalian intern pemerintah (Y) sebesar 34,20% dengan pengujian t signifikan karena $0.007 < 0,05$. Nafarin (2009:20) menjelaskan bahwa anggaran memiliki tiga fungsi yakni: fungsi perencanaan, fungsi pelaksanaan, dan fungsi pengendalian. Dalam hal pelaksanaan anggaran merupakan pedoman dalam pekerjaan, sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan secara selaras dalam pencapaian tujuan. Anggaran penting untuk menyelaraskan (mengkoordinasikan) setiap kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan akan mencerminkan pencapaian hasil/tujuan program pemerintah yang efektif dan efisien.

4. Pengaruh Kepemimpinan dan Penganggaran Terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara Simultan pada BAPPEDA Kabupaten Bandung

Berdasarkan hasil uji pengaruh kepemimpinan dan penganggaran terhadap sistem pengendalian intern pemerintah secara simultan dengan menggunakan uji F atau ANOVA yang telah dihitung diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 12,229 dan nilai F_{tabel} adalah sebesar 3,175 yang berarti $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi 0,000. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kepemimpinan dan penganggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap sistem pengendalian intern pemerintah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bandung. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat nilai kepemimpinan dan penganggaran maka semakin tinggi tingkat pencapaian sistem pengendalian intern pemerintah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bandung.

5. Pengaruh Kepemimpinan Terhadap *Good Government Governance* secara Parsial pada BAPPEDA di Kabupaten Bandung

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat disimpulkan bahwa variabel kepemimpinan (X_1) mempunyai pengaruh langsung terhadap *good government governance* (Z) sebesar 9,10% dengan pengujian t signifikan karena $0.036 < 0,05$, sedangkan pengaruh kepemimpinan (X_1) terhadap *good government governance* (Z) secara tidak langsung yakni melalui sistem pengendalian intern pemerintah (Y) adalah sebesar 30,60% sehingga didapat pengaruh total sebesar 39,70%.

Pengaruh kepemimpinan terhadap *good government governance* dapat dilihat dari teori yang dikemukakan oleh Mulyasa (2013:107) “dimana kepemimpinan dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang yang diarahkan terhadap pencapaian tujuan organisasi yang baik tentunya mencerminkan pelaksanaan *good government governance* dalam hal ini tata kelola pemerintahan oleh pemimpin yang adil, bersih, dan transparan serta akuntabel”.

6. Pengaruh Penganggaran Terhadap *Good Government Governance* secara Parsial pada BAPPEDA di Kabupaten Bandung

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat disimpulkan bahwa variabel penganggaran (X_2) mempunyai pengaruh langsung terhadap *Good Government Governance* (Z) sebesar 12,9% dengan pengujian t signifikan karena $0.007 < 0,05$, sedangkan pengaruh penganggaran (X_2) terhadap *good government governance* (Z) secara tidak langsung yakni melalui sistem pengendalian intern pemerintah (Y) adalah sebesar 29,70% sehingga didapat pengaruh total sebesar 42,60%. Penganggaran dan *good government governance* mempunyai pengaruh sangat penting. Menurut Indra Bastian (2010:193) secara tradisional, prinsip penganggaran yang sangat terkenal adalah apa yang dikenal dengan “*The Three Es*”, yaitu Ekonomis, Efisien, dan Efektif (Jones dan pendlebury, 1988). Jones menjelaskan bahwa ekonomis hanya berkaitan dengan input; efektivitas hanya berkaitan dengan output; sedangkan efisiensi adalah kaitan antara output dengan input. Dengan demikian, prinsip penganggaran terlihat sangat terkait dengan prinsip *good government governance*.

7. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap *Good Government Governance* secara Parsial pada BAPPEDA di Kabupaten Bandung

Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Y) mempunyai pengaruh langsung terhadap *Good Government Governance* (Z) sebesar 86,8% dengan pengujian t signifikan karena $0.000 < 0,05$. Mulyadi (2016:163) mendefinisikan Sistem pengendalian internal pemerintah terdiri dari struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dirancang untuk mendorong efisiensi dalam keputusan kebijakan dari pihak manajemen. Dari efisiensi inilah yang akan menciptakan suatu tatakelola pemerintah yang baik.

8. Pengaruh Kepemimpinan, Penganggaran dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap *Good Government Governance* secara Simultan pada BAPPEDA Kabupaten Bandung

Berdasarkan hasil uji pengaruh kepemimpinan dan penganggaran terhadap sistem pengendalian intern pemerintah secara simultan dengan menggunakan uji F atau ANOVA yang

telah dihitung diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 179,126 dan nilai F_{tabel} adalah sebesar 2,786 yang berarti $F_{hitung} > F_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi 0,000. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel kepemimpinan, penganggaran dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap *good government governance* pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bandung. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat nilai kepemimpinan, penganggaran dan sistem pengendalian intern pemerintah maka semakin tinggi tingkat pencapaian *good government governance* pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bandung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial dari variabel kepemimpinan (X_1) terhadap sistem pengendalian intern pemerintah (Y) pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kab. Bandung.
2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial dari variabel Penganggaran (X_2) terhadap sistem pengendalian intern pemerintah (Y) pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kab. Bandung
3. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan yang diuji secara simultan baik langsung maupun tidak langsung dari variabel kepemimpinan (X_1), penganggaran (X_2) terhadap sistem pengendalian intern pemerintah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kab. Bandung.
4. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial dari variabel kepemimpinan (X_1) terhadap *good government governance* (Z) pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kab. Bandung.
5. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial dari variabel penganggaran (X_2) terhadap *good government governance* (Z) pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kab. Bandung.
6. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial dari variabel sistem pengendalian intern pemerintah (Y) terhadap *good government governance* (Z) pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kab. Bandung.
7. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan yang diuji secara simultan baik langsung maupun tidak langsung dari variabel kepemimpinan (X_1), penganggaran (X_2) dan sistem pengendalian intern pemerintah (Y) terhadap *good government governance* (Z) pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kab. Bandung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelin, Vani dan Fauzihardani, Eka. 2013. Pengaruh Pengendalian Internal, Ketaatan pada Aturan Akuntansi dan Kecenderungan Kecurangan Terhadap Perilaku Tidak Etis. *WRA*, Vol: 1, No. 2, Oktober 2013.
- Adisaputro, Gunawan; Asri Marwan. Anggaran Perusahaan. Cetakan keenam. Yogyakarta: BPFE.

- Asyhad Moh Habib. 2014 Kasus Korupsi di Indonesia Meningkat di 2013-2014 (online 4 maret 2017 jam 16:10) URL <http://intisari.grid.id/Unique/Fokus/Kasus-Korupsi-Di-Indonesia-Meningkat-Di-2013-2014>
- Arifiyadi, Teguh. 2008. Konsep tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia. (serial online), Jul.-Sept., [diakses 5 maret 2017]. Tersedia:URL<http://blogs.depkominfo.go.id/itjen/2008/12/19/konsep-tentang-akuntabilitas-dan-implementasinya-di-indonesia>.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Dea. 2016. Pengaruh Penganggaran Value for Money Terhadap Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Badan Perencanaan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) di Kabupaten Garut. Skripsi tidak diterbitkan. Bandung : Politeknik Pos Indonesia.
- Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang : BP Universitas Diponegoro
- Gandana. 2010. Reformasi Kepemimpinan Public (online akses 4 maret 2017 jam 10.13). URLhttp://hombang.blogspot.com/2010/06/reformasikepemimpinanpublik.html%3Fm%3D1&ved=0ahUKEWj62baB6r_SAhWKv7wKHQ8vDYQFggdMAA&usg=AFQjCNHpiBMHDevJ5JQpRt9HZZY1qWGYA
- Hadari Nawawi, et. al 2006. *Kepemimpinan yang Efektif*. Yogyakarta: UGM Press.
- Jonathan Sarwono. 2007. *Analisis Jalur untuk Riset Bisnis dengan SPSS*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Jonathan Sarwono. 2012. *Path Analysis*. Elex Media Komputindo .
- Joseph Grenny et. al alih bahasa Rahmani Astuti.. 2014. *Influencer: The New Science of Leading Change*.
- Kaloh, J. 2010 *Kepemimpinan Kepala Daerah Pola Kegiatan dan Prilaku Kepala Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Kuswanto goto. 2012. Pelaksanaan Good Governance di Indonesia. (online di akses 6 maret 2017 jam 9.37) URL<http://www.banyumaskab.go.id/read/15538/pelaksanaan-good-governance-di-indonesia>
- Lensufie, Tikno. 2010. *Leadership untuk professional dan mahasiswa*.
- Mardi. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Cetakan pertama. Bogor: Ghala Indonesia.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Edisi Keempat. Yogyakarta: Bagian Penerbitan STIE TKPN.
- Mulyasa. 2013. *Manajemen dan Kepemimpinan*. Cetakan ketiga Edisi 1. Bumi Aksara
- Nafarin, M. 2009. *Penganggaran Perusahaan Edisi keempat*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ni Made Asih Ristanti, Ni Kadek Sinarwati dan Edy Sujana. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan Good Governance. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 2 No. 1 tahun 2014 (diakses 5 maret 2017) URL: <http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/3406>
- Nuning Hindriani, Imam Hanafi, Tjahjanulin Domai. (2012). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah, Vol: 12, No.3.2012 (diakses 5 maret 2017) wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/download/238/207.
- Pasolong, Harbani. 2013. *Kepemimpinan Birokrasi*. Cetakan ketiga. Bandung : ALFABETA.

- Poltak, Iijan S. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Graha Ilmu/
- Rahayu, Sri; Arifian, Andy Rachman. 2013. *Penyusunan Anggaran Perusahaan*. Cetakan Pertama. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Ramdan, Deden (2009). *Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Pemberdayaan Psikologis, Motivasi Kerja dan Budaya Kerja terhadap Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi Serta Implikasinya terhadap Kinerja Pegawai Kandatel di Jawa Barat* (serial online), Vol. 3 No. 2, Nopember 2015 (diakses 5 maret 2017) URL: jurnal.dim-unpas.web.id/index.php/JIMK/article/download/16/16.
- Riantiaro, Reynaldi dan Azlina, Nur. 2011. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu). *Jurnal Pekbis*, Vol: 3, No.3.
- Riduwan; Achmad Engkos Kuncoro. 2014. *Path Analysis*. Cetakan keenam. Bandung: Alfabeta.
- Rivai, Veithzal dan Deddy Mulyadi. 2013. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Edisi Ketiga. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Romney, Marshal B dan Paul John Steinbart. 2014. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi ketigabelas. Diterjemahkan oleh: Kikin Sakinah, Nur Safira dan Novita Puspasari, Jakarta: Salemba Empat.
- Sedarmayanti. 2012. *Good Governance*. Bagian Kedua. Edisi Revisi. Mandar Maju.
- Sugiyono. 2017. *Statistik Non parametris*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-19. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Cetakan ke-8. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sutikno, sobry M. 2014. *Pemimpin dan Gaya Kepemimpinan*. Edisi Pertama. Lombok: Holistica.
- Toha, Miftah. 2014. *Manajemen Kepegawaian Sipil Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Toha, Miftah. 2015. *Kepemimpinan dalam manajemen*. Rajawali pers. Jakarta
- Uha Nawawi Ismail. 2013. *Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja : Proses Terbentuk, Tumbuh kembang, Dinamika, dan Kinerja Organisasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- Widjaja, Amin. 2013. *Corporate Fraud and Internal Control*. Edisi keempat. Jakarta: Harvarindo.
- Wilopo. 2006. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi: Studi Pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi 9*. Padang.
- Windy Tresna Gitayani, Nyoman Ari Surya Darmawan, I Gusti Ayu Purnamawati. (2015). Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Sistem Pengendalian Internal (Spi) Dan Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Akuntansi. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 3 No. 1 2015 (diakses 5 maret 2017) URL: <http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/5096>.
- Wiratna, V. Sujarweni. 2015. *Sistem Akuntansi*. Pustaka Baru Press
- Wirawan. 2013. Raja Grafindo Persada

- Witman. 2014. Good Governance telah terwujudkah, masih ada harapan. (online diakses 4 maret 2017 jam 9.01)URL<http://www.boyyendratamin.com/2014/12/good-governance--telah-terwujudkah-masih.html>
- Wiyanto siko. 2013. Kritik Atas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Online 2 maret 2017 jam 13.40). URLhttp://m.kompasiana.com/sikowiyanto/kritik-atas-sistem-pengendalian-internal-pemerintah_5528ad776ea83466748b45ce
- Yusniyar; Darwanis; Syukriy Abdullah.2016. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan Pengendalian Intern terhadap *Good governance* dan dampaknya pada Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada SKPA Pemerintah Aceh).*Jurnal Magister Akuntansi*, (Online), Vol.5,No.2(<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JAA/article/view/4514> diakses 2 m2017)
- Peraturan daerah kabupaten Bandung nomor 21 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.
- Peraturan Bupati Bandung No. 6 tahun 2008 pasal 24 ayat 3 tentang Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok.
- PP No 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- UU No. 1 tahun 2004 pasal 58 Tentang Perbendaharaan Negara BPK-RI.
- UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.